PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Survei pada 18 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bandung)

KAMILAH NOER

Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

The low quality of the intern controlling system implementation influences the quality of an institution's financial report. Besides it also needs an accounting system for making financial reports. The phenomenon happens because of the lack of intern controlling system in government institutions and the lack of Regional Financial Accounting System's implementation procedure which causes lateness in presenting financial report on a certain periode.

This study aimed at finding out how much the Intern Controlling System would affect the quality of Regional Financial Report and Regional Financial Accounting System towards the quality of Regional Government Financial Report.

The method used in this study is descriptive and verification. The samples were 18 SKPD of Bandung City Government with 154 people as respondents and the sampling technique was sampling jenuh. The data analysis technique used SEM Partial Least Square (PLS) and software SmartLPS 3.0.M3 in addition.

The result showed that intern controlling system significantly affects in a positive way towards the quality of Regional Government Financial Report and Regional Financial Accounting System significantly affects in a positive way towards the quality of Regional Financial Accounting Report on 18 SKPD in Bandung City Government.
Keywords : Intern Controlling System, Regional Financial Accounting System, and quality of Regional Government Financial Report.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu (Mursyidi, 2013:59). Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran ukuran Normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karaktersitik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat dibandingkan, 4) Dapat dipahami (Mursyidi, 2013:47).

Fenomena yang terjadi menurut Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat menyatakan bahwa dalam hasil pemeriksaan atas laporan keuangan menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya mempersiapkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Tahun 2015. Dengan belum diterapkannya SAP berbasis akrual secara memadai tersebut mengakibatkan timbulnya risiko keterlambatan penerapan dan penyusunan laporan keuangan sehingga kualitas terhadap informasi laporan keuangan yang disajikan tidak tepat waktu sesuai dengan periode pelaporan yang berlaku (Emmy Mutiarini, 2015).

Penerapan sistem pengendalian intern yang kurang baik akan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan suatu instansi sehingganya sistem pengendalian intern menjadi sangat penting dalam suatu instansi untuk menjaga kekayaan perusahaan tersebut (Erwin Bahtiar, 2013).

Kondisi yang terjadi saat ini tidak selalu sesuai dengan teori, adapun fenomena yang terjadi di lapangan menurut Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat menyatakan bahwa dalam hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah atas sistem pengendalian intern ditermukannya kelemahan pada sistem pengendalian intern di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Permasalahannya yaitu sebagai berikut Kepala Dinas Pelayanan Pajak belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak daerah. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian piutang pajak daerah dalam Neraca per31 Desember 2014 belum menggambarkan nilai yang sebenarnya. (Emmy Mutiarini, 2015).

Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi. Di mana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah. (Abdul Halim, 2014:83).

Fenomena yang terjadi mengenai sistem akuntansi keuangan daerah yang dikemukakan oleh Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat menyatakan bahwa pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yaitu lemahnya pengikhtisaran dalam penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi terdapat selisih antara saldo piutang denda sewa tanah dan bangunan berdasarkan perhitungan mutasi dan saldo di neraca (Emmy Mutiarini, 2015).

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di dapat maka penulis dapat menulisakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat dan 17 Dinas Pemerintah Kota Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat dan 17 Dinas Pemerintah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk mencari kebenaran atas pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris, guna memecahkan masalah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat dan 17 Dinas Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat dan 17 Dinas Pemerintah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah bagi instansi, terkait seperti Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kualitas laporan keuangan yang belum baik. Berdasarkan konsep kerangka pikir yang telah dibangun, masalah pada kualitas laporan keuangan dapat diperbaiki dengan meningkatkan sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah sehingga akan menjadi lebih baik dan sesuai yang diharapkan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi mamfaat dan selain itu mengembangkan ilmu, dimana teori yang telah ada diuji kembali dalam penelitian ini dapat memperkuat teori yang telah ada yaitu sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Pengendalian Intern

Menurut Numalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2016: 180), Sistem Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melelui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun menurut Mahmudi (2011:252), Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat insidental dan responsive atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus menerus.

Menurut Numalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2016: 181) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan dilingkungan pemerintah di berbagai negara, yang meliputi:

A. Dimensi Lingkungan Pengendalian.
    1. Penegakan integritas dan nilai etika.
    2. Komitmen terhadap kompetensi.
    3. Kepemimpinan yang kondusif.
    4. Pembentukan sturktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
    5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
    6. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
    7. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
B. Dimensi Penilaian Risiko.
    1 Identifikasi Resiko.
    2 Analisis Resiko.
C. Dimensi Kegiatan Pengendalian.
    1. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
    2. Pembinaan sumber daya manusia.
    3. Pengendalian atas peneglolaan sistem informasi.
    4. Penetapan review atas indikator dan ukuran kerja.
    5. Pemisahan fungsi.
    6. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
    7. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
    8. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
    9. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.
D. Dimensi Informasi dan Komunikasi.
E. Dimensi Pemantauan.

2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2014:43) Sistem Akuntansi Keungan Daerah merupakan Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan.

Dari Pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah proses akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara manual atau menggunakan komputer. Menurut Deddi Nordiawan (2010:201) dan Abdul Halim,dkk (2014 :83) dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

A. Dimensi Pencatatan
   1. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
   2. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
   3. Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.

B. Dimensi Pengikhtisaran
   1. Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi
   2. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian
   3. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur.
   4. Pembuatan ayat jurnal penutup
   5. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan
   6. Pembuatan ayat jurnal pembalik

C. Dimensi Pelaporan.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mursyidi (2013:47), kualitas laporan keuangan merupakan Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran ukuran Normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun menurut Sofyan Syafri Harahap (2009:146) kualitas laporan keuangan merupakan Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran yang digunakan agar informasi yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi penggunanya. Menurut Mursyidi (2013 : 47) keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

A. Dimensi Relevan.
   1 Memiliki manfaat umpan balik *(feedback value).*
   2 Memiliki manfaat prediktif *(predictive value).*
   3 Tepat waktu.
   4 Lengkap.

B. Dimensi Andal.
   1 Penyajian jujur.
   2 Dapat diverifikasi *(verifiability).*
   3 Netralitas.

C. Dimensi Dapat dibandingkan.
D. Dimensi Dapat dipahami.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Mahmudi (2007: 27) menyatakan bahwa sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah. Sedangkan menurut Ni Ketut Rusmiadi Putri, Nyoman Ari Surya Darmawan, Desak Nyoman Sri Werastuti (2015) menyatakan bahwa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menerapkan sistem pengendalian internal secara intensif sebagai faktor pendukung yang mempengaruhi dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Mahmudi (2010:27) mengemukakan bahwa Sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas. Adapun menurut Bastian (2007:4) mengemukakan bahwa jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan.

Selanjutnya menurut Safrida yuliani, Nadirsah, dan Usman Bakar (2010) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dinilai cukup bagus dikarenakan implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi akuntansi yang digunakan cukup bagus. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H_0 : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat dan 17 Dinas Pemerintah Kota Bandung.

H_a : Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat dan 17 Dinas Pemerintah Kota Bandung.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:2), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2015:147), pengertian metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Sedangkan metode verifikatif menurut Mashuri (2008) dalam Umi Narimawati (2010:29) menyatakan bahwa metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

3.2 Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel menurut Umi Narimawati (2010:31) adalah Proses penguraian variabel penelitian ke dalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis factor.

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian. Variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel bebas atau Independent
   Menurut Sugiyono (2013:39), variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
   Variabel independen pada penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Intern (X_1)Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)
2. Variabel terikat atau dependent
   Menurut Sugiyono (2013:40), variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
   Variabel dependent dalam hal ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan *(library reserach).* Pengumpulan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*):
   a. Observasi
      Melakukan pengamatan secara langsung pada Inspektorat dan 17 Dinas Pemerintah Kota Bandung untuk memperoleh data yang diperlukan.
   b. Wawancara (Interview)
      Menurut Umi Narimawati (2010:40) , wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
      Adapun wawancara dilakukan terhadap Auditor, P 2 UPD pada Inspektorat Kota Bandung dan Pegawai Sub Bagian Keuangan pada 17 Dinas Pemerintah Kota Bandung
   c. Kuesioner
      Menurut Umi Narimawati (2010:40), kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Adapun kuesioner dilakukan kepada Auditor, P 2 UPD pada Inspektorat Kota Bandung dan Pegawai Sub Bagian Keuangan pada 17 Dinas Pemerintah Kota Bandung.
2. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*
   Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan Penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.4 Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2015: 80), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2012: 81), menyatakan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2014:85), Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi. Oleh karena itu peneliti mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi, yaitu sebanyak 18 SKPD yaitu Inspektorat dan 17 Dinas Pemerintah Kota Bandung dengan 154 responden.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Metode Analisis

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan. Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

1. Analisis Data Deskriptif

   Penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh Inspektorat dan 17 Dinas Pemerintah Kota Bandung berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

2. Analisis Data Verifikatif

   Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS 3.0.* Penulis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya. Menurut Imam Ghozali (2006:18), *Partial Least Square* (PLS) merupakan merupakan metode analisis yang *powerful* oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dipaparkan penguraian serta menganalisis data yang diperoleh mengenai sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kulaitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

4.1.1 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Hasil Pengujian Validitas

   Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika. Apabila koefisien korelasi butir pernyataan dengan skor total item lainnya > 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

   Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai koefisien korelasi lebih besar dari kritis 0,30, hasil ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan untuk ketiga variabel telah memiliki persyaratan validitas dan tepat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data pada penelitian ini.

2. Hasil Pengujian Reabilitas

   Selain valid, alat ukur juga harus memiliki keandalan atau reliabilitas, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan berulangkali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh). Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas. Apabila koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.70 maka secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (reliabel).

   Berdasarkan Nilai koefisien reliabilitas untuk mesing-masing variabel lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tepat, dapat dipercaya (reliable) atau andal.

4.1.2 Analisis Deskriptif Sistem Pengendalian Intern

Tanggapan responden mengenai Sistem Pengendalian Intern terdiri dari lima dimensi dan 20 indikator yang dioperasionalisasikan menjadi 20 butir pernyataan. Dari data penelitian diperoleh penilaian responden untuk lima dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel Sistem Pengendalian Intern dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Sistem Pengendalian Intern

No	Dimensi	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
1	Lingkungan Pengendalian	Penegakan integritas dan nilai etika.	603	770	78,31	BAIK
2		Komitmen terhadap kompetensi.	599	770	77,79	BAIK
3		Kepemimpinan yang kondusif.	619	770	80,39	BAIK
4		Pembentukan stuktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.	602	770	78,18	BAIK
5		Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.	590	770	76,62	BAIK
6		Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.	585	770	75,97	BAIK
7		Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.	606	770	78,70	BAIK
Dimensi Lingkungan Pengendalian			**4204**	**5390**	**78**	**BAIK**
8	Penilaian Resiko	Identifikasi Resiko	594	770	77,14	BAIK
9		Analisis Resiko	610	770	79,22	BAIK
Dimensi Penilaian Resiko			**1204**	**1540**	**78,18**	**BAIK**
10	Kegiatan Pengendalian	Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.	633	770	82,21	BAIK
11		Pembinaan sumber daya manusia.	607	770	78,83	BAIK
12		Pengendalian atas peneglolaan sistem informasi.	607	770	78,83	BAIK
13		Penetapan review atas indikator dan ukuran kerja.	615	770	79,87	BAIK
14		Pemisahan fungsi.	637	770	82,73	BAIK
15		Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.	649	770	84,29	BAIK
16		Pencatatan yang akurat dan tepat	657	770	85,32	BAIK

		waktu atas transaksi dan kejadian.				
17		Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.	603	770	78,31	BAIK
18		Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.	609	770	79,09	BAIK
Dimensi Kegiatan Pengendalian			**5617**	**6930**	**81.05**	**BAIK**
19	Informasi dan Komunikasi	Informasi dan Komunikasi	681	770	88,44	BAIK
Dimensi Informasi dan Komunikasi			**681**	**770**	**88,44**	**BAIK**
20	Pemantauan	Pemantauan	657	770	85,32	BAIK
Dimensi Pemantauan			**657**	**770**	**85,32**	**BAIK**
Total Akumulasi			**12363**	**15400**	**80,28**	**BAIK**

Sumber: Data olah hasil kuesioner, 2016
Perhitungan: Skor Ideal = Nilai tertinggi × Jumlah Responden

Tabel di atas merupakan rekapitulasi jawaban responden pada variabel Sistem Pengendalian Intern yang di ukur menggunakan lima dimensi dan 20 item jumlah pernyataan dari 20 indikator. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang didapat pada variabel Sistem Pengendalian Intern sebesar 80,28%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern pada Inspektorat dan 17 Dinas di Pemerintah Kota Bandung masih tergolong baik, terdapat *gap* sebesar 19,72%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern dan juga bila dilihat dari segi nilai dimensi, dimensi lingkungan pengendalian, tepatnya pada indikator Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif berada di bawah nilai rata-rata variabel.

4.1.3 Analisis Deskriptif Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)

Tanggapan responden mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terdiri dari tiga dimensi dan 10 indikator yang dioperasionalisasikan menjadi 10 butir pernyataan. Dari data penelitian diperoleh penilaian responden untuk lima dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 4.23 sebagai berikut:

Tabel 4.23
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

No	Dimensi	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
1	Pencatatan	Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.	666	770	86,49	BAIK
2		Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.	672	770	87,27	BAIK
3		Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun	631	770	81,95	BAIK

		buku besar.				
Dimensi Pencatatan			**1969**	**2130**	**85,23**	**BAIK**
4	Pengiktisaran	Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi.	631	770	81,95	BAIK
5		Pembuatan ayat jurnal penyesuaian.	640	770	83,12	BAIK
6		Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur.	633	770	82,21	BAIK
7		Pembuatan ayat jurnal penutup	642	770	83,38	BAIK
8		Pembuatan neraca saldo setelah penutupan.	632	770	82,08	BAIK
9		Pembuatan ayat jurnal pembalik.	622	770	80,78	BAIK
Dimensi Pengikhtisaran			**622**	**770**	**80,78**	**BAIK**
10	Pelaporan	Pelaporan	652	770	84,68	BAIK
Dimensi Pelaporan			**652**	**770**	**84,68**	**BAIK**
Total Akumulasi			**6421**	**7700**	**83,39**	**BAIK**

Sumber: Data olah hasil kuesioner, 2016

Tabel di atas merupakan rekapitulasi jawaban responden pada variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang di ukur menggunakan tiga dimensi dan 10 item jumlah pernyataan dari 10 indikator. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang didapat pada variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 83,39%%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Inspektorat dan Dinas di Pemerintah Kota Bandung masih tergolong cukup baik, terdapat *gap* sebesar 16,61%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam dimensi serta indiktor Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

4.1.4 Analisis Deskriptif Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Tanggapan responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari empat dimensi dan 9 indikator. Dari data penelitian diperoleh penilaian responden untuk empat dimensi dari 9 indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 4.33 sebagai berikut :

Tabel 4.33
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Dimensi	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
1	Relevan	Memiliki manfaat umpan balik.	643	770	83,51	BAIK
2		Memiliki manfaat prediktif.	623	770	80,91	BAIK
3		Tepat waktu.	624	770	81,04	BAIK
4		Lengkap.	651	770	84,55	BAIK
Dimensi Relevan			**2541**	**3080**	**82,50**	**BAIK**
5	Andal	Penyajian jujur.	652	770	84,68	BAIK
6		Dapat diverifikasi.	645	770	83,77	BAIK

7		Netralitas.	624	770	81,04	BAIK
Dimensi Andal			**1921**	**2310**	**83,16**	**BAIK**
8	Dapat Dibandingkan	Dapat Dibandingkan	641	770	83,25	BAIK
Dimensi Dapat Dibandingkan			**641**	**770**	**83,25**	**BAIK**
9	Dapat Dipahami	Dapat Dipahami	634	770	82,34	BAIK
Dimensi Dapat Dipahami			**634**	**770**	**82,34**	**BAIK**
Total Akumulasi			**1099**	**1500**	**82,78**	**BAIK**

Sumber: Data olah hasil kuesioner, 2016
Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pernyataan × Nilai tertinggi × Jumlah Responden

Tabel di atas merupakan rekapitulasi jawaban responden pada variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di ukur menggunakan empat dimensi dan 9 indikator. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang didapat pada variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 82,78%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat dan Dinas dan Dinas di Pemerintah Kota Bandung tergolong baik, terdapat *gap* sebesar 17,22%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.1.5 Hasil Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SmartPLS V.3.0*, maka hasil analisis verifikatif Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara Sistem Pengendalian Intern (X_1) dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 0,770 dan termasuk dalam kategori hubungan yang tinggi berada pada interval korelasi antara 0,600-0,799. Artinya Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh yang positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Nilai Koefisien determinasi (parsial) Sistem Pengendalian Intern (X_1) memberikan pengaruh sebesar 32,6% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dan termasuk ke dalam kriteria pengaruh yang cukup atau sedang antara 0,16$\leq$R2<0,49. Sedangkan selisihnya sebesar 67,4% merupakan faktor lain yang tidak diteliti.
3. Nilai Koefisien determinasi (simultan) Sistem Pengendalian Intern (X_1) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) secara bersama-sama memberikan kontribusi pengaruh sebesar 71,30% (tinggi) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), sedangkan selisihnya sebesar 28,7% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti.

3.1.6 Hasil Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SmartPLS V.3.0*, maka hasil analisis verifikatif Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 0,790 dan termasuk dalam kategori hubungan yang sedang/cukup berada pada interval korelasi antara 0,600-0,799. Artinya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Nilai koefisien determinasi (parsial) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) memberikan pengaruh sebesar 38,7% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (Y) dan termasuk ke dalam kriteria pengaruh yang sedang/cukup antara 0,16≤R2<0,49. Sedangkan selisihnya sebesar 61,3% merupakan faktor lain yang tidak diteliti.

3. Nilai Koefisien determinasi (simultan) Sistem Pengendalian Intern (X_1) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) secara bersama-sama memberikan kontribusi pengaruh sebesar 71,30% (tinggi) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), sedangkan selisihnya sebesar 28,7% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti.

3.1.7 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai t_{hitung} Sistem Pengendalian Intern sebesar 6,341 lebih besar dari t_{kritis} (1,975). Karena nilai t_{hitung} lebih besar dibanding t_{tabel}, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat dan 17 Dinas Kota Bandung.

2. Pengujian Hipotesis Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai t_{hitung} korelasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 6,650 lebih besar dari t_{tabel} (1,975). Karena nilai t_{hitung} lebih besar dibanding t_{tabel}, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat dan Dinas Kota Bandung.

4.1 Pembahasan

4.1.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 6,341 lebih besar dari t_{tabel} (1,975) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat dan 17 Dinas Kota Bandung.

Fenomena mengenai Sistem Pengendalian Intern yang dikemukakan oleh Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat (Emmy Mutiarini, 2015) bahwa terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota Bandung kinerjanya belum memuaskan dikeranakan hasil pemeriksaan kinerja dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2014 Pemerintah Kota Bandung masih lemahnya lingkungan pengendalian dan penilaian resiko adalah karena Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif belum begitu terealisasi dan Efektivitas fungsi pengendalian intern dalam mengidentifikasi hambatan pada Dinas saat ini belum efektif (Emmy Mutiarini, 2015).

Lemahnya sistem pengendalian intern, juga terjadi pada Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pengelolaan atas pendapatan Retribusi Sarana Olahraga (SOR) dan Gelanggang Olahraga (GOR) yang tidak tertib sehingga mengakibatkan pengguna fasilitas dirugikan atas kelebihan pembayaran retribusi sewa SOR Bulutangkis Lodaya minimal hal ini terjadi karena Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga kurang optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan fasilitas SOR/GOR (Emmy Mutiarini, 2015).

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui dimensi lingkungan pengendalian dengan indikator perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dengan persentase 75,97% dapat diinterpretasikan dalam kategori baik, namun terdapat *gap* sebesar 24,03% yang jika di rata-ratakan dengan indikator dari dimensi lainnya yang sama berada di bawah nilai variabel, salah satu indikator dari dua dimensi ini memiliki persentase terendah.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh sebesar 32,6% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan nilai korelasi sebesar 0,770 yang berarti Sistem Pengendalian Intern memberikan pengaruh yang sedang/cukup arah positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat dan Dinas Kota Bandung. Arah hubungan positif Sistem Pengendalian Intern dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukan bahwa Sistem Pengendalian Intern yang semakin baik akan diikuti dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Sistem Pengendalian Intern memberikan pengaruh sebesar 32,6% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan sisanya 67,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Intern mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 80,28% dan termasuk kategori baik yang artinya Sistem Pengendalian Intern sudah baik.. Terdapat *gap* sebesar 19,72% yang merupakan masalah yang ada pada Sistem Pengendalian Intern. Selanjutnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 82,78% dan masuk dalam kategori baik yang artinya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan respondenya adalah indikator penyajian jujur sebesar 84,68%, dan indikator paling rendah adalah memiliki manfaat prediktif sebesar 80,91%, namun masih terdapat *gap* sebesar 18,22%.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana Sistem Pengendalian Intern yang semakin baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat dan Dinas Kota Bandung.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah (Mahmudi, 2007: 27). Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori yang menyatakan bahwa menurut jurnal yang ditulis oleh Ni Ketut Rusmiadi Putri, Nyoman Ari Surya, Desak Nyoman Sri Werastuti (2015) menyatakan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal mempunyai pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, diharapkan kepada masing-masing koperasi agar lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menerapkan Sistem Pengendalian Internal secara intensif sebagai faktor pendukung yang mempengaruhi dalam menghasilkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Adapun saran yang diberikan penulis dalam meningkatkan Sistem Pengendalian Intern yaitu Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang lebih efektif lagi pada kemudian hari dan untuk Identifikasi Resiko adalah Efektivitas fungsi pengendalian intern dalam mengidentifikasi hambatan pada Dinas selama ini harus lebih ditingkatkan kembali.

4.1.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 6,650 lebih besar dari t_{kritis} (1,975) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 2 signifikan. Artinya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat dan Dinas Kota Bandung.

Fenomena mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dikemukakan oleh Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat mengatakan bahwa Permasalahan dalam sistem akuntansi keuangan daerah salah satunya, lemahnya pengikhtisaran dalam penyusunan neraca saldo

berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung (Emmy Mutiarini, 2015).

Permasalahan dalam sistem akuntansi keuangan daerah juga terdapat nilai kas di kas daerah yang tersaji di neraca pada 31 Desember 2014 tidak seluruhnya direalisasikan tepat waktu dan tidak seluruhnya berada di rekening Koran Kas Daerah melainkan termasuk kas yang berada dalam rekening pihak bank BJB (Hesti Sunaryono, 2015).

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui dimensi pengikhtisaran dengan indikator penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi dengan persentase 81,95% dapat diinterpretasikan dalam kategori baik, namun terdapat *gap* sebesar 18,07% yang jika di rata-ratakan dengan indikator dari dimensi lainnya yang sama berada di bawah nilai variabel, salah satu indikator dari dimensi pengikhtisaran ini memiliki persentase kedua terendah.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh sebesar 38,7% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan nilai korelasi sebesar 0,790 yang berarti Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan pengaruh sedang/cukup arah positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat dan Dinas Kota Bandung. Arah hubungan positif Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik akan diikuti dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan pengaruh sebesar 38,7% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan sisanya 61,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 83,39% dan termasuk kategori baik yang artinya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sudah cukup baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan respondenya adalah indikator periode pelaporan 84%, dan selanjutnya indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator pembuatan ayat jurnal pembalik 80,78%. Terdapat gap sebesar 16,61% yang merupakan masalah yang ada pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat dan Dinas Kota Bandung.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Menurut Mahmudi (2010:27) mengemukakan bahwa Sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Pernyataan dia atas di dukung oleh jurnal yang ditulis oleh Safrida yuliani, Nadirsah, dan Usman Bakar (2010) menyatakan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dinilai cukup bagus dikarenakan implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi akuntansi yang digunakan cukup bagus. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Adapun saran yang diberikan penulis dalam meningkatkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia dengan cara pelatihan kepada para pegawai, sumber daya manusia sangat diperlukan dalam menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, sangat diperlukan pegawai yang profesional di bidang akuntansi sektor publik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian itern berpengaruh cukup/sedang terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada 18 SKPD yaitu Inspektorat dan 17 Dinas Pemerintah Kota Bandung. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena memiliki beberapa masalah seperti:
   a. Masih lemahnya dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif belum begitu terealisasi dan,
   b. Lemahnya sistem pengendalian intern, juga terjadi pada Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pengelolaan atas pendapatan Retribusi Sarana Olahraga (SOR) dan Gelanggang Olahraga (GOR) yang tidak tertib
2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh sedang/cukup terhadap kualitas laporan keuangan pada Inspektorat dan Dinas. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena memiliki beberapa masalah seperti:
   a. Lemahnya pengikhtisaran dalam penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

1. Untuk meningkatkan sistem pengendalian intern yang masih belum optimal Pada 18 SKPD yaitu Inspektorat dan 17 Dinas Pemerintah Kota Bandung, makan peneliti memberikan saran operasional sebagai berikut:
   a. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang lebih efektif lagi pada kemudian hari
   b. Untuk mengoptimalkan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan fasilitas SOR/GOR maka bisa dilakukan dengan cara membuat perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kota Bandung dengan pengelola SOR/GOR, dan Kepala UPTD disarankan untuk melakukan pendataan terkait pihak-pihak yang memanfaatkan fasilitas SOR/GOR sebagai dasar penagihan biaya sewa.
2. Untuk meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah yang masih belum optimal Pada 18 SKPD yaitu Inspektorat dan 17 Dinas Pemerintah Kota Bandung, makan peneliti memberikan saran operasional sebagai berikut:
   a. Meningkatkan sumber daya manusia dengan cara pelatihan kepada para pegawai, sumber daya manusia sangat diperlukan dalam menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, sangat diperlukan pegawai yang profesional di bidang akuntansi sektor publik.

5.2.2 Saran Akademis

1) Bagi Pengembang Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sebagai sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan disiplin ilmu Akuntansi Sektor Publik, serta berkontribusi dalam pengembangan penelitian khususnya mengenai Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca khususnya dalam ilmu akuntansi sektor publik.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya
Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan metode yang sama tetapi dengan variabel, unit analis dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep diterima secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

As Syifa Nurillah dan Dul Muid. 2014. *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pemamfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok*. Diponegoro Journal Of Accounting. Volume 3 No. 2.

Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar, (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Akademia

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014*. Jakarta: BPK RI.

Baldric Siregar. 2015. Akuntansi Sektor Publik. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual* Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Darise, Nurlan. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indeks. Jakarta.

Deddi Nordiawan. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Erlina Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian.

Erwan, Dyah Ratih. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial.* Yogyakarta: Gava Media.

Fajar, adrianus. 2011. *Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten bandung.* Skripsi UPI.

Guilford, J.P. 1956. *Fundamental Statistic in Psychology And Education.* 3rd Ed. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc

Harahap, Sofyan Syafri, 2013, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Cetakan Kesebelas, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Ihyaul Ulum. 2008. *Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press.

Imam Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPPS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.

Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.* Jurnal Akuntansi. Vol 2 No. 1 Tahun 2014.

Mahmudi. 2010. *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Mahsun, Moh.,Sulistyowati, Firma., dan Purwanugraha, Heribertus Andre. 2011a. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: BPFE.

Menteri Dalam Negeri. 2007. *Peraturan Pemerintah dalam negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Cetakan kedua. Bandung: Reflika ADITAMA.

Nanang Martono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder.* Jakarta: Rajawali Pers.

Ni Ketut Rusmiadi Putri, Nyoman Ari Surya Darmawan, Desak Nyoman Sri Werastuti. 2015. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng.* e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Volume 3, No. 1 Tahun 2015.

Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng)*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Volume 2 No: 1 Tahun 2014.

Noor, Juliansyah. (2011). *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana

Nur Indrianto dan bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.* Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Nurlan *Darise*. *2008. Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.

Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi. 2016. *Akuntansi Pemerintah.* Jakarta: IN MEDIA.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

Rahmadi Murwanto. 2012. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.* LPKPAP.

Rukmi Juwita. 2013. *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Volume 12, No. 2, Desember 2013, Hal. 201–214.

Sari. 2013. *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Ejournal melalui <http://ejournal-s1.stkip-pgrisumbar. ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/1147. Vol 2, No 2.

Subadriyah, Anita Rahayuningsih. 2015. *Analisis Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah*. *The 2nd University Research Coloquium* 2015 ISSN 2407-9189.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta

Sujarweni V, Wiratna. 2015. *Sistem Akuntansi.* Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Tuti Herawati. 2014. Pengaruh *Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur).* STAR – Study & Accounting Research | Vol XI, No. 1 – 2014. ISSN : 1693-448.

Uce Indahyanti. 2013. *PPS-PLS*. Diakses pada tanggal 10 April 2015.

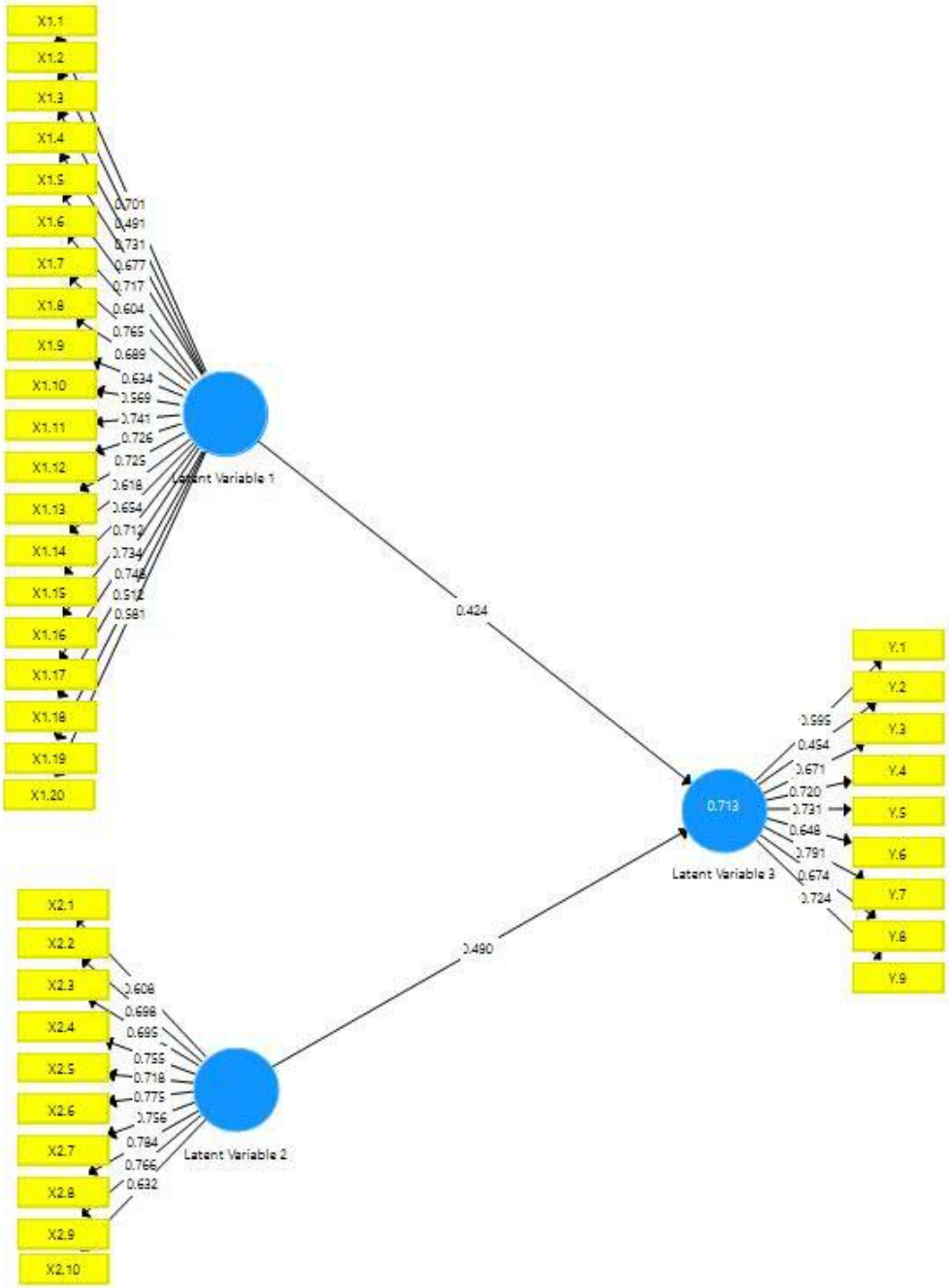
Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi.* Bandung: Agung Media.

Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.

Vicky Agustiawan Lasoma. 2013. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara*. Jurnal Universitas Negeri Gorontalo

Koefisien Jalur Struktural



Path Coefficients UJI T

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (|O/STDEV|)	P Values
Sistem Pengendalian Intern -> Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,424	0,430	0,067	6,341	0,000
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah -> Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,490	0,489	0,074	6,650	0,000

Nilai T hitung

